

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Liquefied Petroleum Gas 3 KG adalah salah satu komoditas sektor migas yang diproduksi oleh PT Pertamina (Persero) yang disubsidi penuh oleh pemerintah agar para konsumen minyak tanah dapat beralih ke LPG. Penggunaan elpiji sebagai pengganti minyak tanah selain bisa mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin juga bisa menekan subsidi BBM yang selama ini ditanggung APBN selain itu pemakaian elpiji tidak menimbulkan polusi yang berlebihan. Program konversi ini sendiri muncul seiring kian menipisnya persediaan minyak tanah bagi para masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah dimana diharapkan dengan adanya program tersebut dapat menggantikan kelangkaan mitan di masyarakat sekaligus menekan pengeluaran rumah tangga dalam Lingkaran, Daud dan Femmi (2016).

M.Iham (2013), menyatakan peralihan konvesi dari minyak tanah ke gas LPG sejak tahun 2007 merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam pembatasan penggunaan minyak tanah untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Kebijakan ini diambil untuk mengalihkan penggunaan bahan bakar minyak tanah sebagai kebutuhan untuk memasak di karenakan kira-kira pada tahun 2025 minyak tanah yang terdapat di Indonesia di perkirakan akan habis oleh karena itu pemerintah berupaya untuk mencari pengganti minyak tanah yaitu gas LPG apalagi sampai saat sekarang kebutuhan rumah tangga terus meningkat dan jumlah minyak tanah sudah berkurang dan bahkan sulit untuk didapatkan oleh masyarakat. Oleh karena itu

pemerintah menetapkan gas LPG sebagai bahan bakar dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga untuk ke depannya dan masyarakat harus beralih dari minyak tanah ke gas LPG Penggunaan gas LPG dimaksudkan untuk menekan pemakaian bahan bakar minyak tanah secara terus menerus. Gas LPG merupakan bahan bakar yang diambil dari gas bumi yang terkandung dalam bumi dan diolah menjadi gas yang dapat digunakan oleh masyarakat sebagai inovasi baru dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia sehingga masyarakat tidak terpaku hanya pada satu bahan bakar saja.

Era modern saat ini cara berfikir manusia semakin praktis aneka alat rumah tangga diciptakan dengan teknologi tinggi dan serba elektronik dimaksudkan untuk mempermudah segala pekerjaan, salah satu produk tersebut adalah kompor dengan bahan bakar gas LPG yang berguna untuk menggantikan sistem pembakaran kompor dengan bahan bakar minyak tanah yang konon dikatakan sudah ketinggalan jaman. Pada sisi lain gas LPG sudah tidak dianggap lagi sebagai barang mewah melainkan sudah sebagai kebutuhan pokok rumah tangga masa kini. Tidak dapat dipungkiri bahwa semakin modern dan praktis suatu alat akan semakin besar pula resiko yang ditimbulkannya.

Menjalankan kebijakan penggunaan gas LPG pemerintah harus efektif dalam pemberian gas LPG 3 kg bersubsidi dimana komoditi ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Berdasarkan Undang-undang No 27 Tahun 2001 Tentang kegiatan usaha hilir gas, seluruh bisnis minyak dan gas LPG sudah terbuka bagi pelaku usaha maupun kondisi di pasar yang menunjukkan bahwa industri ini memiliki potensi yang besar dan sekarang menjadi komoditi yang sangat penting bagi masyarakat. Dalam

pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram yang berbunyi : Penyediaan dan Pendistribusian LPG tabung gas 3 kg hanya di peruntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro.

Kebijakan publik merupakan bagian dari upaya yang dilakukan pemerintah untuk rakyatnya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik yang sesuai dengan makna dasarnya yakni dari, oleh dan untuk rakyat diperlukan implementasi yang sesuai dengan keadaan masyarakat setempat melalui desentralisasi yang diwujudkan perannya oleh pemerintah daerah yang dianggap lebih mengenal dan dekat dengan masyarakat lokal.

Perekonomian di Indonesia pemerintah bertindak sebagai pengawas dan pemain sesuai dengan Undang-undang 1945 pemerintah harus berperan seta dalam perekonomian dan melakukan intervensi jika diperlukan tetapi tetap mengakui keberadaan pihak swasta. Salah satu peran pemerintah adalah efektivitas dimana peran ini mengharuskan pemerintah untuk memperhatikan efektivitas pemberian gas subsidi LPG 3 Kg ke masyarakat sehingga tepat pada sasaran. Menurut Bhayangkara (2008), efektivitas dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Menurut Mardiasmo (2005), efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Sedangkan menurut Gibson (2010) dalam buku Herbani Pasolong, efektivitas adalah pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas.

Selama ini pemberian subsidi gas LPG 3 Kg di Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang ternyata masih didapati aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan dalam kegiatan pemberian gas LPG 3 Kg yang dilakukan oleh agen kepada penyalur gas LPG 3 Kg tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penyimpangan yang dilakukan dalam proses pemberian gas LPG 3 Kg bersubsidi di Kenagarian Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang yaitu masih ditemukannya perbedaan harga jual eceran gas LPG 3 Kg bersubsidi yang dilakukan oleh beberapa penyalur gas LPG 3 Kg bersubsidi, dimana penyalur menjual gas LPG 3 Kg bersubsidi dengan harga Rp25.000,- sampai Rp 27.000,- pertabung di Kecamatan Canduang dimana harga tersebut melebihi harga jual HET gas LPG 3 Kg bersubsidi yang ditetapkan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, seharusnya penyalur menjual dengan harga eceran tertinggi (HET) yaitu Rp 17.000,- pertabung. Harga ini berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat No 95 Tahun 2014 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg bersubsidi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneeliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Pemberian Subsidi Gas LPG 3 Kg di Kenagarian Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah efektivitas pemberian subsidi gas LPG 3 Kg di Kenagarian Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas pemberian subsidi gas LPG 3 Kg di Kenagarian Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menambah wawasan mahasiswa dan saya sendiri tentang efektivitas pendistribusian gas LPG 3 Kg bersubsidi di Kenagarian Canduang, Koto Laweh Kecamatan Canduang.
2. Sebagai bahan rujukan atau tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematis Penelitian

Secara garis besar pembahasan ini nantinya terdiri dari enam bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan konsep teori yang nantinya akan mendukung penelitian ini, selain itu penullisan juga akan memaparkan tentang kerangka pemikiran dan yang terakhir adalah definisi konsepsional.

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Berisi uraian mengenai definisi operasional, rancangan penelitian, objek penelitian, metode pengumpulan data, data yang diperlukan dan metode analisis.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang gambaran umum Kecamatan Canduang Kenagarian Canduang Koto laweh yang penulis teliti terkait dengan penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan-pembahasan yang terkait dengan hasil penelitian yang menjelaskan tentang Efektivitas Pemberian Gas LPG 3 Kg di Kenagarian Canduang Koto, Laweh Kecamatan Canduang.

BAB VI : PENUTUP

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang hal-hal penting yang dituangkan dalam bentuk kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang bersifat membangun guna terlaksananya tugas dengan baik.